

## **ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Supardi <sup>a\*)</sup>, Anis Fauzi <sup>a)</sup> Nurdina Fitri <sup>a)</sup>, Mila Nuroniyah <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

<sup>\*)</sup>e-mail korespondensi:nurdinafitri80@gmail.com

*Article history: received 01 June 2025; revised 12 June 2025; accepted 06 July 2025*

*DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v13i2.12156>*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pendidikan nasional yang masih menimbulkan berbagai tantangan, termasuk ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan yang buruk. berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kecacatan dalam menerapkan pedoman dan dampaknya pada masyarakat dan sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak inisiatif, termasuk program pendidikan wajib dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru. Kesenjangan antara menyiapkan pedoman dan mewujudkannya di tempat telah terbukti menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, lebih banyak strategi partisipatif diperlukan karena masyarakat juga terlibat dalam proses perencanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, pedoman yang diterapkan sebenarnya dapat merespons keadaan setempat dan mempromosikan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Politik, Kebijakan pendidikan

### **ANALYSIS OF EDUCATIONAL POLICY IN INDONESIA**

**Abstract.** The aim of this study is to analyze the quality of national education, which still poses various challenges, including inequality of access and poor quality of education. various factors affecting success or disability in implementing the guidelines and their impact on society and the education system. The results show that there are many initiatives, including compulsory education programs and training to improve teachers' skills. The gap between preparing guidelines and putting them into practice has proven to be a major obstacle. Therefore, more participatory strategies are needed as communities are also involved in the education policy planning process. Therefore, the implemented guidelines can actually respond to local circumstances and promote the overall improvement of education quality.

**Keywords:** Education, Politics, Education policy

## **I. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan usaha yang direncanakan dengan penuh kesadaran untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik bisa secara aktif mengasah potensi mereka. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, karakter, kecerdasan, moral yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka, masyarakat, bangsa, dan negara. (Basyar, 2018) Pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam proses pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sering kali kualitas pendidikan menjadi fokus perhatian, terutama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, masih terdapat sejumlah kendala, seperti ketimpangan akses, tidak terpenuhinya kualitas pengajaran, dan minimnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, kajian kebijakan pendidikan menjadi penting untuk memahami tindakan yang sudah diambil serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. M. Sirozi (2015) dalam karyanya tentang Politik Pendidikan menguraikan bahwa pendidikan dan politik adalah dua aspek penting dalam sistem sosial politik di masing-masing negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang. Seringkali keduanya dianggap sebagai elemen terpisah yang tidak memiliki keterhubungan, padahal sesungguhnya mereka saling mendukung dan bekerja sama dalam membentuk masyarakat. Pendidikan dan politik saling melengkapi, berkolaborasi dalam harmoni yang satu. Pendidikan dipandang sebagai pilardasar dalam membentuk individu dan komunitas, sementara politik memiliki fungsi penting dalam membangun kerangka kebijakan yang mempengaruhi sistem pendidikan. Elemen kedua ini, tanpa disadari, berperan secara bersamaan dalam menentukan arah perkembangan sosial.

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi dalam kajian ini, dapat dirumuskan bahwa menurut WJS Poerwadarminta (2014), keputusan serta langkah kebijakan pemerintah yang menunjukkan dukungan, baik secara moral maupun material, terhadap keberlangsungan pendidikan Islam, ternyata tidak lepas dari pengaruh dinamika politik dan arah kebijakan pendidikan yang diambil. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Sejak masa reformasi, pemerintah telah mencanangkan sejumlah program untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, seperti penerapan program wajib belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Meski demikian, efektivitas berbagai kebijakan tersebut sering dibahas, terutama ketika diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada. Salah satu aspek penting dalam kebijakan evaluasi adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh beragam faktor seperti kondisi ekonomi, struktur sosial, dan dinamika politik. Misalnya, ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan berdampak besar terhadap kualitas pendidikan, khususnya di wilayah terpencil. Selain itu, keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan—terutama yang berkaitan dengan arah politik pendidikan Islam di Indonesia.

Kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia saat ini menitikberatkan pada peningkatan mutu tenaga pendidik (Bahri, 2022). Melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi, para guru pendidikan Islam diberikan peluang untuk keterampilan mengajar, memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai agama, serta menguasai metode pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran agama Islam di berbagai satuan pendidikan. Di sisi lain, dalam menganalisis kebijakan pendidikan, pendekatan partisipatif juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Artinya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak layanan pendidikan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta ikut terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan. Pelibatan ini tidak hanya menjadikan kebijakan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap dunia pendidikan, yang pada akhirnya dapat mendorong keterlibatan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan melakukan analisis kebijakan yang menyeluruh, diharapkan solusi yang tepat dan efektif dapat ditemukan guna menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dan melibatkan masyarakat secara aktif, strategi peningkatan kualitas pendidikan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Hal ini sangat krusial untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa.

## II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam tulisan ini memanfaatkan Penelitian Perpustakaan atau yang dikenal sebagai riset literatur, di mana riset literatur ini bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang bersumber dari buku dan jurnal yang relevan dengan tema Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia. Peneliti terlibat langsung dengan materi tertulis, bukan dengan pengalaman lapangan secara langsung. Meski begitu, peneliti dalam riset literatur ini berupaya menganalisis dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan tema tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Politik dan Pendidikan

Menurut Roger F. Soltau dalam buku *Introduction to Politics*, istilah politik merujuk pada studi mengenai negara, tujuan negara, serta lembaga-lembaga yang bertugas untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. J. Barent dalam *Ilmu Politika* menyatakan bahwa politik merupakan ilmu yang menyelidiki kehidupan negara sebagai bagian dari kehidupan masyarakat serta menganalisis bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya.

Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, politik dimaknai sebagai berikut:

- Pengetahuan mengenai urusan pemerintahan dan negara, mencakup sistem pemerintahan dan fondasi-fondasi pemerintahannya.
- Semua aktivitas dan tindakan, kebijakan, serta strategi yang dilakukan.
- Kebijakan dan metode yang digunakan ketika menghadapi isu-isu tertentu.

Sekarang, mari kita bahas definisi pendidikan. Dalam *Kamus Bahasa Arab*, terdapat beberapa istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan pendidikan, yaitu:

- Ta'lim, yang terdapat dalam QS Al-Baqarah (2):31 "Dan Allah mengajarkan Adam semua nama, kemudian Dia berkata kepada para malaikat, 'Beritahu saya semua nama itu jika kalian benar.'"
- Tarbiyah, yang tercantum dalam QS Al-Isra' (17):24 "... wahai Tuhanku, cintailah keduanya sebagaimana mereka mendidikku saat aku masih kecil."
- Ta'dib, yang terdapat dalam salah satu hadits Nabi, "Allah mendidikku, maka Dia memberikanku pendidikan yang terbaik."

Selanjutnya, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dijelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam upaya menjadikan seseorang lebih dewasa melalui pengajaran dan

pelatihan. Jamil Shaliba dari Lembaga Bahasa Arab di Damaskus mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan mental melalui latihan yang dilakukan secara bertahap demi mencapai kesempurnaan. Sementara itu, menurut MJ Langeveld, pendidikan adalah suatu kegiatan yang bertujuan membimbing anak menuju kedewasaan dan kemandirian. Di sisi lain, Kingsley Price memandang pendidikan sebagai suatu proses di mana nilai-nilai budaya nonmateri dijaga dan dikembangkan melalui proses pembelajaran anak-anak maupun orang dewasa. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan antara konsep pendidikan dan politik. Keduanya sama-sama berkaitan erat dengan kehidupan manusia, berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, serta tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan individu dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendidikan maupun politik menyentuh seluruh aspek kehidupan, sehingga setiap orang tanpa memandang peran besar atau kecilnya tetap terlibat dalam keduanya, secara langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, perbedaannya adalah bahwa politik lebih berfokus pada pencapaian posisi dalam konteks wilayah atau kekuasaan, baik itu dalam skala besar maupun kecil, sedangkan pendidikan berfokus pada upaya individu untuk memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan sebagai persiapan dalam menjalani kehidupan di masa depan atau berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas.

Namun ini harus dibedakan dengan pendidikan politik pendidikan yang pengertian dan wilayahnya sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya di dunia politik.
- b. Pendidikan politik berorientasi pada bagaimana peserta didik menjadi manusia yang melek politik.
- c. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai usaha untuk “melek politikkan” peserta didik bisa dicapai secara efektif, misalnya saja tentang sistem pengajaran, metode pengajaran, kurikulum pendidikan, dan sebagainya.
- d. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai sejauh mana sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga Negara, pemilu dan sebagainya.
- e. Pendidikan politik setara pengertiannya dengan pendidikan ekonomi, pendidikan agama, dan sebagainya

## **2. Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia**

Kebijakan merupakan turunan dari kata bijak yang memiliki prefiks ke dan sufiks an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah bijak merujuk kepada penggunaan nalar yang bijaksana, keterampilan, kecerdasan, serta kemampuan berbicara. Dalam bahasa Inggris, istilah kebijakan diartikan sebagai policy yang berarti rencana tindakan atau pernyataan tujuan. Kebijakan sendiri adalah deklarasi cita-cita, sasaran, prinsip, atau niat sebagai panduan untuk mencapai target tertentu. Politik mencakup semua pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan atau negara semua urusan serta tindakan berkaitan dengan kebijakan dan strategi terkait dengan pemerintahan suatu negara atau interaksi dengan negara lain. Pemahaman mengenai kebijakan pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Ali Imran berdasarkan pendapat Carter V. Good, adalah suatu pertimbangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan evaluasi terhadap faktor-faktor situasional. Pertimbangan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan pendidikan yang terstruktur serta berfungsi sebagai perencanaan umum untuk pengambilan keputusan agar tujuan institusional dapat terpenuhi. Kebijakan dapat dipahami serupa dengan kurikulum, yang didefinisikan sebagai sekumpulan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, serta metode pengajaran sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pembelajaran demi mencapai sasaran pendidikan yang spesifik.

Secara etimologis, kurikulum berasal dari istilah curriculum dalam bahasa Latin, dari kata currere yang berarti bergerak cepat, maju dengan cepat, menyusuri, terburu-buru, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Istilah currere berasal dari kursus yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Jika dihubungkan dengan kata vitae, dapat diartikan sebagai riwayat atau perjalanan. Oleh karena itu, curriculum vitae merujuk kepada riwayat hidup. Dalam catatan pendidikan Indonesia, kurikulum tahun 1947 dirilis antara 1945 dan 1949. Selanjutnya, kurikulum 1952 ditetapkan dari 1950 hingga 1961. Di era Orde Lama, kurikulum terakhir adalah Kurikulum 1964. Selama periode Orde Baru, terdapat empat kurikulum yang diterapkan. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Lalu, kurikulum 1975 diperkenalkan. Pada tahun 1984, disusunlah kurikulum baru yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang ditingkatkan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif. Kurikulum baru, yang dinamakan Kurikulum 1994, diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai kurikulum yang terakhir dari Orde Baru. Ketika Era Reformasi berlangsung, Kurikulum 2004 diluncurkan, sering disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi dengan standar isi dan standar kompetensi (sisko) yang memberikan panduan bagi sekolah dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Melalui perjalanan sejarah kurikulum nasional ini, A. Fery T. Indarto mengamati bahwa penyesuaian kurikulum yang terjadi berulang kali di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh besar dari kekuasaan dalam urusan pendidikan. Dari hal itu, ia menyimpulkan bahwa kurikulum yang diterapkan di suatu negara, termasuk Indonesia, sering kali berfungsi sebagai alat untuk mengindoktrinasi suatu pola kekuasaan. Semua institusi pendidikan formal di negara ini, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil ataupun sepanjang pantai, menggunakan kurikulum yang sama. Oleh sebab itu, proses pendidikan yang dijalankan diarahkan untuk menciptakan cara berpikir yang seragam. Melalui sistem pendidikan nasional, generasi muda Indonesia dibentuk dengan acuan kepada politik etatisme 3.

## **3. Gambaran Umum Problematika Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan di Indonesia merupakan fondasi utama dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan mendorong kemajuan bangsa. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sejumlah permasalahan mendasar masih menjadi tantangan serius. Meskipun peran pendidikan sangat penting dalam

kehidupan, tidak semua individu, termasuk para pemimpin, menunjukkan komitmen yang setara dalam mendukung kemajuan sektor ini (Tintingon Josly Yakob, dkk., 2023: 804).

Istilah "problematika" berasal dari kata bahasa Inggris *problem*, yang berarti persoalan, tantangan, atau teka-teki. Pendidikan sendiri memiliki beragam definisi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan hasil dari proses peradaban yang dibentuk oleh pandangan hidup suatu bangsa. Pendidikan menjadi sarana pengalaman yang membentuk pemahaman, pola pikir, serta penyesuaian diri seseorang dalam proses perkembangan pribadinya. Dengan demikian, problematika pendidikan merujuk pada berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan (Sumiati Tuti, 2011). Saat ini, masyarakat Indonesia lebih mengutamakan kualitas daripada sekedar kuantitas pendidikan. Bustan (2022: 573) menyebutkan beberapa persoalan utama yang dihadapi pendidikan nasional, salah satunya adalah ketertinggalan sistem pendidikan kita dibandingkan negara-negara maju. Kualitas pendidikan yang masih rendah menjadi tantangan nyata yang perlu segera diatasi. Penguatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem ini. Kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan merata. Upaya meningkatkan mutu pembelajaran serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul akan menjadi fondasi bagi keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut, mutu pendidik yang belum optimal serta kurikulum yang kurang sesuai dengan tuntutan kerja dunia juga menjadi penghambat kemajuan. Faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan dalam akses pendidikan, juga membantu kondisi ini. Ketimpangan antara wilayah juga nyata terlihat, di mana sekolah-sekolah di daerah terpencil masih sangat tertinggal dibandingkan yang ada di pusat kota. Di sisi lain, krisis moral dan lemahnya karakter pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Nilai-nilai seperti kejujuran nampaknya semakin langka dan bahkan terkesan dapat "diperdagangkan" dengan mudah dalam kehidupan sosial masyarakat (Bustan, 2022). Saat ini, kekuatan politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem pendidikan di negara ini, menunjukkan bagaimana partai-partai politik telah memasukkan pendidikan ke dalam persaingan kekuasaan mereka. Fungsi pendidikan telah berubah dari fokus pada pengembangan manusia Indonesia secara menyeluruh menjadi alat untuk memperkuat kepentingan partai tertentu. Selain itu, ketika otonomi daerah dan kemandirian pengajaran dijalankan, sejumlah kepala daerah lebih mengutamakan preferensi pribadi dibandingkan dengan objektivitas dalam memilih individu yang berkualitas dalam sektor pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah mempengaruhi sektor pendidikan setempat.

Setiap kali terdapat pergantian menteri, kerap kurikulum pendidikan juga mengalami perubahan. Latar belakang pendidikan menteri sering kali berdampak pada arah kurikulum yang diimplementasikan. Perubahan dalam program pendidikan dianggap wajar karena diyakini dapat meningkatkan relevansi serta kemampuan menghadapi tantangan global. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika elemen humanisme kurang diperhatikan dalam kurikulum tersebut. Selain itu, modifikasi ini juga meningkatkan beban biaya bagi orang tua terkait pendidikan sekolah anak-anak mereka.

Mengingat berbagai tantangan ini, Indonesia perlu terus berusaha menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, meliputi pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, sangat penting agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat global dan dapat berkontribusi secara signifikan. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini demi menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik.

#### 4. Konsep Kualitas Pendidikan

Primayana (2015) menyatakan bahwa mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya peran sentral yang dimainkan oleh para pendidik. Para guru memiliki kontribusi besar dalam mendorong peningkatan standar pendidikan. Secara keseluruhan, kualitas pendidikan mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan siswa, masyarakat, serta negara. Evaluasi terhadap mutu pendidikan tidak semata-mata didasarkan pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup aspek pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan sikap sosial peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kualitas pendidikan harus melibatkan berbagai dimensi yang saling terintegrasi.

Salah satu komponen penting dalam menentukan mutu pendidikan adalah kesesuaian kurikulum. Kurikulum yang dirancang dengan baik harus mampu merespons perubahan zaman serta kebutuhan dunia kerja. Pendidikan yang bermutu sangat erat kaitannya dengan keberadaan kurikulum yang relevan, karena kurikulum menjadi dasar dari proses pembelajaran. Pembelajaran akan berjalan efektif apabila materi yang diajarkan sesuai dengan realitas dan tuntutan zaman (Ibarra Saiz et al., 2021).

Di Indonesia, kurikulum terus mengalami penyesuaian untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski demikian, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa kurikulum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan aplikasi dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, penting bagi kurikulum untuk bersifat relevan agar dapat menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global.

Di samping kurikulum, kualitas tenaga pengajar juga menjadi faktor krusial dalam menunjang mutu pendidikan. Guru memegang posisi utama dalam proses belajar-mengajar, di mana efektivitas pengajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyampaikan materi, membangun suasana kelas yang mendukung, serta membimbing siswa secara optimal. Maka, peningkatan profesionalisme guru melalui program pelatihan dan pendidikan lanjutan menjadi sangat esensial. Investasi dalam pengembangan kapasitas guru diyakini dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, keberadaan fasilitas dan sarana pendidikan turut menentukan mutu pendidikan. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap—seperti ruang belajar yang nyaman, laboratorium, serta akses teknologi—dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Namun di Indonesia, masih banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal, yang mengalami kekurangan dalam hal sarana dasar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan tantangan penting yang perlu diselesaikan guna meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Peran orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan juga tidak kalah penting. Keterlibatan orang tua, seperti mendampingi anak belajar di rumah dan menjalin komunikasi dengan guru, dapat meningkatkan motivasi serta prestasi belajar siswa. Demikian pula, partisipasi masyarakat dalam bentuk program pendidikan, pemberian beasiswa, atau kegiatan ekstrakurikuler, dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Oleh sebab itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Akhirnya, sistem evaluasi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menjamin mutu pendidikan. Penilaian yang sistematis memungkinkan pengidentifikasian kelemahan dan potensi dalam sistem pendidikan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, sekolah, dan tenaga pendidik—sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan program pendidikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pemahaman tentang mutu pendidikan harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, dinamis, dan membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

### **5. Kebijakan Pendidikan Di Indonesia**

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi yang signifikan, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dalam negeri. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari revisi kurikulum, peningkatan kualitas guru, hingga perluasan akses pendidikan yang lebih merata di berbagai wilayah. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Salah satu kebijakan strategis yang diluncurkan adalah program wajib belajar, yang bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memperluas pembangunan dan ketersediaan sekolah, terutama di wilayah terpencil, serta memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Meski demikian, implementasi program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kesenjangan pendidikan antara wilayah kota dan desa, serta perbedaan akses yang dialami oleh kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, peningkatan mutu tenaga pengajar juga menjadi aspek penting yang mendapatkan perhatian serius. Pemerintah mengadakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru, mengingat peran strategis guru dalam menunjang kualitas proses pembelajaran. Harapannya, peningkatan kemampuan mengajar akan berkontribusi langsung pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan pelatihan tersebut relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Pembaruan kurikulum juga terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Kurikulum 2013, yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, mencakup ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan. Kendati demikian, dalam penerapannya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya pemahaman dari para pendidik dan keterbatasan sarana pendukung. Akhirnya, aspek evaluasi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kebijakan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan berkala terhadap kebijakan yang diimplementasikan guna mengukur efektivitas serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Di samping itu, keterlibatan aktif dari berbagai pihak—baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat—sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

### **6. Analisis Kebijakan yang telah Ditetapkan di Indonesia**

Analisis kebijakan merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, menyebarkan, serta memahami kebijakan publik yang telah berlaku maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan rekomendasi berbasis data yang akurat dan relevan mengenai berbagai pilihan kebijakan, sekaligus menilai potensi serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari setiap alternatif. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan berbagai opsi kebijakan, hingga penilaian terhadap kemungkinan hasil dari masing-masing pilihan tersebut. Di Indonesia, analisis kebijakan bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi, pemerintah Indonesia sering menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui analisis kebijakan, kita dapat menilai seberapa efektif keputusan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada, dampaknya terhadap masyarakat, serta efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Proses ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, seperti dinamika politik, kebutuhan sosial masyarakat, dan ketersediaan sumber daya.

Dengan memahami isi dan konteks kebijakan yang telah diterapkan, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan mutu kebijakan di masa depan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Analisis kebijakan publik tidak hanya mencakup pengamatan terhadap kebijakan yang sudah ada dan komponennya, tetapi juga mencakup proses perancangan serta pengembangan alternatif yang memungkinkan. Proses ini dapat diperluas melalui studi dan riset yang memberikan perspektif atau penjelasan terhadap isu-isu kebijakan yang perlu menjadi perhatian. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi sangat penting agar program-program yang dijalankan tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun bukan faktor utama dalam pengambilan keputusan, analisis kebijakan tetap memegang peranan penting karena merupakan bagian esensial dalam proses kajian di lembaga-lembaga pembuat kebijakan.

Sebagai contoh, salah satu kebijakan pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

1. **Tujuan:** Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan memberikan bantuan dana pendidikan.
2. **Analisis:** Implementasi kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di kalangan anak-anak dari kelompok ekonomi lemah. Namun, tantangan yang masih muncul adalah ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama antara kota besar dan daerah terpencil, yang juga disertai dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah.
3. **Alternatif Solusi:** Untuk mengurangi kesenjangan ini, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara merata melalui perbaikan infrastruktur sekolah, penguatan kapasitas guru, serta pemanfaatan teknologi pendidikan di daerah-daerah yang kurang terjangkau.

## 6. Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi dalam Sektor Pendidikan

Pendidikan sering kali menjadi sektor prioritas dalam perumusan kebijakan pemerintah karena dianggap sebagai fondasi utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, sering ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dan implementasinya di lapangan. Situasi ini umum terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, meskipun kebijakan pendidikan telah disusun dengan baik di tingkat nasional, hasilnya tidak selalu merata atau efektif saat diterapkan di tingkat daerah. Kesenjangan kebijakan dalam bidang pendidikan merujuk pada perbedaan antara visi, misi, atau target yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan. Contohnya, program Wajib Belajar 12 Tahun dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya di wilayah-wilayah terpencil sering terkendala oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, dan medan geografis yang sulit dijangkau. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975), kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya dalam sektor pendidikan muncul karena adanya interaksi kompleks antara isi kebijakan, kondisi lingkungan, serta kapasitas lembaga pelaksana. Dalam konteks pendidikan, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga politik yang saling berkaitan.

Kesenjangan antara rumusan kebijakan dan penerapannya membawa dampak serius, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Beberapa dampak yang dapat muncul antara lain:

1. **Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan:** Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak di daerah perkotaan.
2. **Rendahnya Kemampuan Dasar Siswa:** Gagalnya penerapan kebijakan secara menyeluruh dapat berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi, numerasi, dan keterampilan siswa.
3. **Meningkatnya Jumlah Anak Putus Sekolah:** Kurangnya fasilitas dan bantuan pendidikan membuat banyak siswa, terutama di daerah tertinggal, harus menghentikan pendidikan mereka.
4. **Menurunnya Kepercayaan Masyarakat:** Ketika kebijakan pendidikan tidak membuahkan hasil yang nyata, masyarakat mulai meragukan kemampuan dan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan.

## 7. Penyebab Kesenjangan Kebijakan Pendidikan

Beberapa faktor utama yang memicu terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan antara lain sebagai berikut:

### a. Perencanaan yang Tidak Inklusif

Kebijakan pendidikan kerap dirancang di tingkat nasional tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi serta kebutuhan di tingkat lokal. Misalnya, kebijakan digitalisasi melalui program *Merdeka Belajar* memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Namun, banyak sekolah di daerah terpencil belum memiliki akses internet, pasokan listrik yang stabil, ataupun perangkat teknologi yang diperlukan untuk mendukung program tersebut.

### b. Terbatasnya Alokasi Anggaran

Minimnya anggaran pendidikan di daerah menjadi salah satu kendala besar dalam pelaksanaan kebijakan. Walaupun alokasi dana pendidikan nasional telah ditetapkan sebesar 20% dari APBN, distribusinya tidak selalu merata dan pemanfaatannya di tingkat daerah kerap kurang efektif. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), semakin memperumit implementasi kebijakan pendidikan di lapangan.

### c. Ketimpangan Sarana dan Prasarana

Perbedaan signifikan antara fasilitas pendidikan di kota dan di pedesaan turut memperlebar kesenjangan. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, bahkan fasilitas dasar seperti toilet yang layak, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran.

#### d. Minimnya Pelatihan dan Dukungan bagi Guru

Keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan sangat tergantung pada kapasitas para pendidik. Sayangnya, tidak sedikit guru yang belum menerima pelatihan yang cukup untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru, seperti pembelajaran berbasis proyek atau kurikulum berbasis kompetensi dalam program *Merdeka Belajar*.

#### e. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi

Kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan sering kali berjalan tanpa kontrol yang memadai. Akibatnya, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan tidak segera terdeteksi, sehingga respons yang diberikan cenderung terlambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

### 8. Pengaruh Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia

Kebijakan politik pendidikan di Indonesia adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan (pemerintah, DPR, dan lembaga terkait lainnya) untuk mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini memiliki pengaruh yang sangat luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu, masyarakat, hingga arah pembangunan bangsa. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh kebijakan politik pendidikan di Indonesia:

#### Terhadap Akses dan Pemerataan Pendidikan

##### 1. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS):

**Kebijakan Wajib Belajar:** Program wajib belajar 9 tahun (kemudian 12 tahun) adalah contoh kebijakan politik yang paling mendasar. Kebijakan ini secara langsung mendorong peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam konteks ini, kebijakan wajib belajar diberlakukan di tingkat dasar dan terus berkembang hingga ke pendidikan menengah dengan program Wajib Belajar 12 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang memadai (Hasanah & Jabar, 2017).

**Bantuan Operasional Sekolah (BOS):** Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk mendukung dana kegiatan pendidikan di sekolah dasar. Gumilang dkk. (Gumilang et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun dana BOS berencana untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan, implementasinya seringkali tidak merata, yang menyebabkan kesenjangan khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Pemberian dana BOS mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua, sehingga menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan akses ke sekolah.

**Pembangunan Infrastruktur Pendidikan:** Kebijakan alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, terutama di daerah terpencil dan terluar, berkontribusi pada pemerataan akses fisik terhadap pendidikan. Infrastruktur pendidikan memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Sarana dan prasarana yang baik, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat teknologi informasi, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran Setyawan dkk. (2024). Penelitian menunjukkan bahwa sekolah dengan infrastruktur yang baik cenderung menghasilkan prestasi akademik yang lebih tinggi, sehingga penting untuk memperhatikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan (Falah & Hadna, 2022).

##### 2. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):

**Dasar Hukum dan Prosedur:** Kebijakan zonasi PPDB dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur tentang PPDB. Dalam implementasi ini, sekolah dibagi menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan jarak geografis serta kepadatan penduduk.

**Manfaat Awal:** Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa di daerah kurang mampu dan mengurangi eksklusivitas sekolah-sekolah favorit yang terletak di kawasan elit. Kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses dan mengurangi kesenjangan antar sekolah, meskipun implementasinya seringkali menimbulkan pro dan kontra.

##### 3. Kesenjangan Akses:

Meskipun ada upaya pemerataan, kebijakan politik seringkali belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan akses yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Faktor politik seperti alokasi anggaran yang belum merata, prioritas pembangunan daerah, dan kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi masih menjadi penghalang.

#### Terhadap Kualitas Pendidikan

##### 1. Pengembangan Kurikulum:

**Arah dan Filosofi Pendidikan:** Setiap perubahan kebijakan politik seringkali diikuti dengan perubahan kurikulum (misalnya, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka). Perubahan ini mencerminkan filosofi pendidikan yang dianut pemerintah saat itu, seperti fokus pada karakter, kompetensi, atau inovasi.

**Relevansi dengan Kebutuhan Zaman:** Kebijakan kurikulum berusaha menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan pasar kerja dan perkembangan global (misalnya, penekanan pada literasi digital, STEM, atau *soft skills*).

##### 2. Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan:

**Kebijakan Sertifikasi dan Profesionalisme Guru:** Kebijakan politik yang mendorong sertifikasi guru dan tunjangan profesi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Penempatan tenaga pendidik yang tidak merata juga menjadi faktor penyebab kesenjangan. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki guru yang berkualitas, yang berdampak pada rendahnya standar pendidikan di lokasi tersebut (Nurlinawati & Putranto, 2020).

**Rekrutmen dan Distribusi Guru:** Kebijakan politik mempengaruhi pola rekrutmen (PNS, PPPK), penempatan, dan distribusi guru. Kekurangan guru di daerah terpencil dan kelebihan guru di perkotaan seringkali menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh kebijakan.

### 3. Standar Nasional Pendidikan:

Kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengatur delapan standar (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian). Ini adalah kerangka untuk memastikan kualitas minimal pendidikan, meskipun implementasinya masih bervariasi.

## IV. SIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program dan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, sejumlah permasalahan mendasar masih menjadi hambatan yang nyata. Ketimpangan dalam akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kualitas pengajaran, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata merupakan beberapa isu krusial yang terus mengemuka. Meskipun kebijakan seperti program wajib belajar, penguatan kompetensi guru, dan pemberian bantuan pendidikan telah dijalankan, pelaksanaannya di lapangan sering terhambat oleh berbagai faktor eksternal mulai dari kondisi sosial dan ekonomi, hingga dinamika politik yang berpengaruh terhadap arah dan konsistensi kebijakan. Lebih jauh lagi, upaya reformasi pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya orang tua, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal, memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan, kebijakan yang dirancang sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat top-down perlu dipadukan dengan mekanisme bottom-up, agar setiap kebijakan yang dihasilkan lebih relevan secara kontekstual dan memiliki dampak yang lebih nyata. Dalam konteks ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh (holistik) dalam merancang dan menyebarkan kebijakan pendidikan, yang mencakup aspek kurikulum, sumber daya manusia, pendanaan, serta lingkungan belajar yang mendukung. Hanya dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman, visi pendidikan Indonesia yang berkualitas dan merata dapat benar-benar terwujud dalam praktiknya.

## V. REFERENSI

- Asep, R., Nurti, Q., & Qiqi. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik pendidikan Indonesia*.
- Bustan. (2022). Problematika sistem pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 4(1).
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Effendy, M. (2019). *Kebijakan pendidikan Indonesia: Perspektif dan implementasi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage Publications.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Laporan evaluasi program Merdeka Belajar*. Mardapi, D. (2018). *Evaluasi kurikulum di Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Megawangi, R. (2004). Pendidikan berbasis karakter: Membangun generasi unggul. Institut Pertanian Bogor.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation. University of California Press.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy. *Policy Studies Journal*, 8(4).
- Safitri Ulandari, dkk. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *Journal Homepage*, 6(1).
- Suhariadi, F., Sugiarti, R., Hardaningtyas, D., Mulyati, R., Kurniasari, E., Saadah, N., Yumni, H., & Abbas, A. (2023). Work from home: A behavioral model of Indonesian education workers' productivity during Covid-19. *Heliyon*, 9(3).
- Sumiati, T. (2011). Problematika pendidikan di Indonesia dan solusi pemecahannya. *Statement*, 1(1).
- Sutjipto, Prof. Dr., M.Si. (2017). Kajian infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Universitas Negeri Jakarta.
- Suyanto, Prof. Dr., M.Ed. (2009). Masalah dan tantangan guru di era globalisasi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- UNESCO. (2018). Global education monitoring report.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society*.
- Khosiyono, B. (2019). Kebijakan pendidikan bahasa asing di Indonesia dalam perspektif masyarakat global. *Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi Dan Aplikasi*, 6(1), 70-82. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v6i1.20612>
- Khosiyono "Kebijakan pendidikan bahasa asing di Indonesia dalam perspektif masyarakat global" *Jurnal pembangunan pendidikan fondasi dan aplikasi* (2019) doi:10.21831/jppfa.v6i1.20612.
- Irawan dkk. "Menangani Ketimpangan Pendidikan Melalui Kebijakan Berkelanjutan: Evaluasi dari Perspektif Kebijakan Pendidikan dan SDGs di Indonesia" *Jurnal hukum dan pembangunan berkelanjutan* (2024) doi:10.55908/sdgs.v12i1.3152.
- Pulungan "WACANA POLITIK PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA" *Forum paedagogik* (2019) doi:10.24952/paedagogik.v11i1.1780.
- Sibarani dan Sinamo "Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia" *Kne social sciences* (2020) doi:10.18502/kss.v4i14.7900.
- Novrizal dan Manaf "Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia" (2024) doi:10.23917/mier.v2i1.4297.
- Hutabarat "Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi" *Societas dei jurnal agama dan masyarakat* (2018) doi:10.33550/sd.v4i2.69.
- Acedo, C., Utomo, E., & Yeom, M. (2002). The reform of secondary education in Indonesia during the 1990s: basic education expansion and quality improvement through curriculum decentralization. *Asia Pacific Education Review*, 3(1), 56-68. <https://doi.org/10.1007/bf03024921>
- Evandio, R., Mar'iyah, C., & Mulyadi, M. (2023). Review of political representation through representative-constituent relations: case study of members of the dpr-ri 2014-2019 west java electoral district ix pdi-struggle faction maruarar sirait. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(8), 1142-1151. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i8.663>
- Hafidati, P. (2021). Kebijakan publik terhadap pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan orde reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.770>
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44. <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Hantono, H., Pangaribuan, W., Mudjisusatyo, Y., & Zainuddin, Z. (2024). Peran analisis kebijakan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan manajemen pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(2), 590-600. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3811>
- Gaol, N. (2022). Policy process in the context of education: a content analysis. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.44281>

- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Maghfuri, A. (2020). Analisis kebijakan pendidikan islam pada awal era reformasi (1998-2004). *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14-26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>
- Salwadila, T. (2021). Sistem dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan islam pada era reformasi. *Sindang Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2), 158-163. <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1196>
- Hasanah, Y. M. and Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah kota yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Setyawan, K., Rahmatullah, F., & Hastijanti, R. (2024). Penerapan prinsip sekolah masa depan pada perancangan sekolah menengah kejuruan. *SARGA: Journal of Architecture and Urbanism*, 18(1), 84-92. <https://doi.org/10.56444/sarga.v18i1.1092>
- Falah, A. I. and Hadna, A. H. (2022). Problematika pendidikan masa pandemi di indonesia pada daerah 3-t (terluar, tertinggal, dan terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164-185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Nurlinawati, I. and Putranto, R. (2020). Faktor-faktor terkait penempatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama daerah terpencil/sangat terpencil. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 31-38. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v4i1.3312>
- Ichsan, F. N. and Hadiyanto, H. (2021). Implementasi perencanaan pendidikan dalam meningkatkan karakter bangsa melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(3), 541-551. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.3.2021.1203>
- Грибан, О. Н., Грибан, И. В., & Korotun, A. V. (2019). Modern teacher under the conditions of digitalization of education. *Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: From Regional Dev.* <https://doi.org/10.2991/mtde-19.2019.121>
- Nurkolis, N., Muhti, M., Maryant, M., & Kusumaningsih, W. (2024). Various factors that influence the successful implementation of school digitalization policies. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15270>
- Khalilova et al., "Dampak teknologi digital terhadap kualitas pendidikan di bidang manajemen transportasi air" *BioWeb of Conferences* (2024) doi:10.1051/bioconf/202410705008
- Sarah, "Ketimpangan Pendidikan Eksklusif Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kegiatan Digitalisasi Pendidikan" *Qalamuna: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama* (2022) doi:10.37680/qalamuna.v14i2.1959
- Männistö et al., "Pembelajaran kolaboratif digital dalam pendidikan keperawatan: tinjauan sistematis" *Scandinavian Journal of Caring Sciences* (2019) doi:10.1111/scs.12743
- Souza, "Kebijakan Berorientasi Misi untuk Mempromosikan Teknologi Digital dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan" *Jaringan Administrasi Publik* (2023) doi:10.20473/jap.v14i2.48736
- Mcgarr et al., "Kompetensi digital dalam pendidikan guru: membandingkan kebijakan nasional di Norwegia, Irlandia, dan Spanyol" *Media Pembelajaran dan Teknologi* (2021) doi:10.1080/17439884.2021.1913188
- Purwanti "PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DAN IMPLEMENTASINYA" *Dwija Cendekia Jurnal Riset Pedagogik* (2017) doi:10.20961/jdc.v1i2.17622.
- Alirmansyah dan Wulandari "Peran Ekstrakurikuler Pramuka dalam Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Alam di Sekolah Dasar" *Jiip - jurnal ilmiah ilmu pendidikan* (2023) doi:10.54371/jiip.v6i10.2976.